Transformasi Partisipasi Publik Melalui Platform Digital di Era Demokrasi Digital.

Angelica Ivana Nadia Cinta Harimurti

2316041085

Pendahuluan :

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam demokrasi dan keterlibatan publik. Era demokrasi digital ditandai dengan banyaknya platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Keterlibatan publik yang dulu lebih sering dilakukan melalui cara-cara tradisional seperti pertemuan langsung, demonstrasi, atau mekanisme formal lainnya kini beralih ke dunia digital lewat media sosial, aplikasi e-government, forum online, dan saluran konsultasi publik yang berbasis teknologi. Perubahan ini menandakan munculnya era baru dalam demokrasi, di mana ruang untuk aktivitas politik tidak terbatas lagi pada fisik tetapi meluas ke dunia digital yang lebih terbuka dan partisipatif (Nugroho dan Sari, 2021).

Di Indonesia, fenomena ini semakin jelas terlihat seiring dengan bertambahnya pengguna internet dan tingginya penggunaan media sosial. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang, yang berarti sekitar 78,19% dari total populasi. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Situasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dalam isu-isu publik. Contohnya, masyarakat dapat mengeluarkan pendapat politik, memberikan kritik terhadap kebijakan, atau menyatakan dukungan untuk isu tertentu melalui platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Selain itu, pemerintah juga mulai membuat berbagai aplikasi berbasis digital untuk memperlancar interaksi dan komunikasi dengan warga, seperti Lapor. go. id, Saber Pungli, dan aplikasi layanan publik berbasis e-government di daerah (Kurniawan, 2022).

Peralihan partisipasi publik melalui platform digital memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama, platform digital memperluas akses bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan terlibat melalui cara-cara partisipasi tradisional. Kedua, kecepatan dalam menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan meningkat, sehingga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ketiga, platform digital juga mendorong inklusivitas dengan memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok marginal, generasi muda, serta masyarakat di daerah terpencil untuk tetap dapat berkontribusi dalam proses demokrasi (Prasetyo, 2020). Dengan demikian, partisipasi publik yang digital berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkaya budaya politik di masyarakat.

Namun, perubahan ini juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko. Pertama, banyaknya informasi yang salah dan hoaks di media sosial bisa membahayakan kualitas demokrasi dengan menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Kedua, kesenjangan digital masih menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil yang belum sepenuhnya memiliki akses internet yang baik. Ketiga, rendahnya kemampuan literasi digital di masyarakat membuat sebagian warga tidak dapat memanfaatkan platform digital secara kritis, etis, dan efektif. Keempat, masalah keamanan data dan privasi pengguna semakin penting di tengah banyaknya penyalahgunaan data pribadi. Tanpa penanganan yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat mengurangi makna partisipasi publik digital, sehingga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi (Susanti dan Widodo, 2022).

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui media digital juga mengalami masalah dalam hal representativitas. Meskipun banyak orang yang terhubung dengan internet, partisipasi yang terjadi di platform media sosial tidak selalu mewakili keinginan semua lapisan masyarakat. Dominasi kelompok tertentu yang memiliki kemampuan digital lebih baik atau akses teknologi yang lebih luas sering kali membuat suara kelompok-kelompok minoritas tidak terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, demokrasi digital belum sepenuhnya menjamin keadilan partisipasi tanpa adanya kebijakan yang mendorong pemerataan akses dan peningkatan kemampuan digital (Fitriani, 2021).

Di sisi lain, terdapat potensi besar dalam partisipasi digital yang dapat berfungsi untuk memperkuat demokrasi yang berbasis diskusi. Ruang diskusi publik di media digital mampu mendorong interaksi antarwarga, meningkatkan kesadaran politik, serta memperluas keterlibatan politik di kalangan generasi muda. Generasi milenial dan generasi Z, yang merupakan pengguna utama internet di Indonesia, memiliki peluang untuk berperan signifikan dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta inovasi di dalam demokrasi digital (Handayani, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989) mengenai demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi yang efektif, akses setara terhadap informasi, dan pengendalian terhadap agenda publik.

Oleh karena itu, perubahan dalam partisipasi masyarakat melalui platform digital di zaman demokrasi digital dapat dipandang sebagai kesempatan sekaligus tantangan. Kesempatannya terletak pada kemampuan teknologi untuk memperluas, mempercepat, dan memperdalam partisipasi publik. Sementara tantangannya adalah bagaimana memastikan agar partisipasi digital benar-benar inklusif, mewakili semua suara, dan berkualitas. Karena itu, dibutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk memaksimalkan penggunaan platform digital. Peningkatan kemampuan digital, pemerataan infrastruktur teknologi, regulasi yang fleksibel, serta penerapan prinsip etika dan akuntabilitas digital menjadi syarat penting untuk mencapai partisipasi publik digital yang sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulan :

Transformasi keterlibatan masyarakat melalui platform digital dalam konteks demokrasi digital adalah sebuah fenomena yang menunjukkan perubahan signifikan dalam sistem demokrasi saat ini. Adanya teknologi digital telah memperluas akses masyarakat untuk ambil bagian dalam politik dan pemerintahan melalui media sosial, aplikasi pemerintahan elektronik, dan forum online yang lebih cepat, terbuka, dan menyeluruh. Meskipun demikian, partisipasi secara digital juga menghadapi hambatan seperti penyebaran informasi yang salah, polarisasi, ketidakmerataan akses, rendahnya kemampuan literasi digital, serta masalah privasi dan keamanan data. Oleh sebab itu, agar perubahan ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas demokrasi, perlu adanya rencana yang menyeluruh yang mencakup pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan kemampuan masyarakat, regulasi yang sesuai, serta penerapan prinsip etika dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, keterlibatan masyarakat berbasis platform digital bisa menjadi alat yang efektif untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber :

APJII. (2023). *Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Handayani, T. (2023). Generasi Muda dan Partisipasi Politik Digital di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia, 8*(2), 112–128.

Widodo, H. (2022). Hoaks, Literasi Digital, dan Tantangan Demokrasi di Era Digital. *Jurnal Masyarakat dan Politik, 29*(2), 175–190.

|  |
| --- |
| Mannayong, J., & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, *20*(1), 53-75. |
|  |